

Kerjasama Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah Kalimantan

(Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan)

Nira Hariyatie¹

The Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)

surel: nira207@yahoo.com, nira.hariyatie@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis peranan kerjasama lintas batas, KLB seperti kerjasama Sosek Malindo terhadap pembangunan daerah di kawasan perbatasan Indonesia, wilayah Kalimantan, yang didasarkan pada pemikiran dasar dari KLB, yaitu pada dimensi ekonomi, politik, budaya dan sejarah, dan kerjasama dan kompetisi. Studi ini menemukan bahwa pembangunan daerah di Kalimantan telah melaksanakan pembangunan pada skala global, dengan pengembangan yang memprioritaskan pembangunan daerah-daerah perbatasan yang mempunyai nilai strategis karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah). dengan membina hubungan kerjasama dengan Negara tetangga melintasi batas-batas antar Negara yaitu kerjasama Sosek Malindo yang merupakan strategi untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah dalam konteks globalisasi. Melalui kerjasama Sosek Malindo secara signifikan memberikan sumbangan positif untuk pembangunan daerah wilayah Kalimantan, khususnya di kawasan perbatasan.

Kata Kunci: Kerjasama Lintas Batas (KLB), pembangunan kawasan perbatasan dan pembangunan daerah.

Pendahuluan

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara) (Wikipedia Indonesia). Indonesia dengan luas sebesar 1.904.569 km², menjadikannya negara kelima terbesar di dunia yang memiliki perbatasan di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (maritime borders) dan di darat dengan 3 (tiga) Negara tetangga (border regions) (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 2007). Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perbatasan dengan

Negara tetangga yang cukup luas, yaitu sepanjang 4.800 km².

Wilayah perbatasan Indonesia terdiri dari perbatasan darat, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua New Gini dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dan perbatasan maritim yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Gini.

Wilayah perbatasan secara luas menyebar dengan berbagai tipologi dari pedalaman ke pulau-pulau kecil terluar. Kondisi ini memberikan tantangan besar yang mempengaruhi kontrol tata letak dalam mengamankan wilayah perbatasan, khususnya dalam menyediakan sumber daya keuangan dan manusia. Tantangan yang dihadapi Indonesia di wilayah perbatasan memiliki

¹ Program Doktor Ilmu Ekonomi Unlam Jalan Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123, INDONESIA

kondisi dan karakteristik yang khas dengan daerah lain. Wilayah perbatasan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, ketersediaan sumber daya alam dan manusia, social-ekonomi, kondisi politik dan budaya dan tingkat kesejahteraan rakyat Negara tetangga. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh semua daerah perbatasan di Indonesia adalah kemiskinan dan kurangnya struktur dasar sosial dan infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006).

Lokasi strategis wilayah perbatasan membawa kesempatan terhadap kegiatan ilegal seperti illegal fishing, tradisional pelintas perbatasan secara ilegal, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan penebangan liar, atau isu-isu keamanan seperti perampokan bersenjata terhadap kapal dan pembajakan di laut. terorisme maritim di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau orang asing dan masalah garis perbatasan negara-negara yang menyebabkan banyak kerugian Indonesia (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 2007).

Di beberapa wilayah perbatasan di Indonesia, terdapat beberapa masalah mengenai garis perbatasan dengan negara tetangga, yang masih dalam proses pembicaraan bilateral. Sepanjang tahun-tahun ini, upaya untuk menangani isu-isu dan masalah perbatasan diambil dengan mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, juga untuk batas maritim dengan negara tetangga. Melalui upaya yang komprehensif dari semua unsur-unsur Negara dan kemauan yang baik dari Negara-negara tetangga melalui kerjasama lintas batas {cross border cooperation, CBQ, dalam menangani isu-isu terkini, CBC diantisipasi menjadi sebuah mekanisme atau platform dalam menyelesaikan masalah-masalah perbatasan.

Indonesia memiliki laut yang luas dan lahan sumber daya alam, tapi semua sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata di seluruh propinsi di Indonesia, serta sumber daya manusia sebagai agen pembangunan negara. Implikasinya adalah bahwa provincial

infrastructures and services yang kurang berkembang, khususnya di daerah yang terisolasi dan terpencil. Kasus yang terabaikan dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional Indonesia sejak tahun 1969 tersebar luas. Gap yang luas dari pembangunan ekonomi nasional antar wilayah ini terjadi khususnya dalam pengembangan wilayah Timur Indonesia, yang terdiri Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan pulau-pulau Nusa Tenggara, yang relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di kawasan Indonesia Barat, seperti Jawa dan Pulau Sumatera. Pengembangan mencakup aspek sumber daya manusia, kondisi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi. dan pemerataan infrastruktur lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1980).

Faktor lain yang berkontribusi terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi nasional antar wilayah adalah wilayah perbatasan yang umumnya sangat rendah dalam pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan masa lalu yang cenderung memarginalkan wilayah perbatasan hanya berfungsi sebagai sabuk keamanan, khususnya zona Kalimantan yang berdekatan dengan Malaysia Timur. Secara umum, kontribusi ekonomi wilayah perbatasan sangat rendah, yaitu kurang dari 0,1% (satu per mil) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1980). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah ini terbelakang.

Seperti yang disebutkan oleh Kurniadi (2003 ; 2) bahwa perlakuan khusus untuk wilayah perbatasan di Indonesia hanya dalam tampilan pertahanan dan keamanan di mana wilayah perbatasan dianggap sebagai daerah rentan menghadapi ancaman dari pihak asing. Persepsi ancaman berasal dari penekanan keamanan pandangan militer negara dan integritas teritorial sebagai tujuan, bukan kesejahteraan rakyat. Pendekatan keamanan wilayah perbatasan di Indonesia seperti wilayah perbatasan Kalimantan adalah dengan alasan kegiatan kriminal seperti penyelundupan, perdagangan dan penebangan liar sering terjadi di wilayah ini (Aswandi, 2006).

Selain itu, kebijakan pembangunan daerah di Indonesia sejauh ini cenderung berorientasi 'inward looking', yang menunjukkan bahwa, wilayah perbatasan bukan prioritas utama pembangunan negara. Oleh karena itu, daerah perbatasan diasumsikan mewakili daerah non prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, daerah terpencil menjadi semakin sulit untuk berkembang karena kenyataan bahwa lokasinya terlalu terisolasi dan tidak terjangkau sebagai hasil dari kurangnya jasa-jasa transportasi.

Letaknya yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan, dan marginalitas dalam kaitannya dengan inti nasional telah membawa kerugian geografis ke wilayah ini (Guo, 1996, hal 33-34). Pandangan atau pernyataan ini yaitu perhatian yang diberikan ke daerah tersebut selama ini yang kurang dari daerah lain atau kurang dikembangkan daripada daerah lain di Indonesia dan dengan negara tetangga.

Metode

Studi ini merupakan studi exploratory untuk tujuan menemukan sesuatu yang menarik dan mendeskripsikan kerjasama lintas batas untuk pembangunan daerah di kawasan Kalimantan, Indonesia yang memanfaatkan kerjasama lintas batas dengan Negara tetangga, Malaysia. Studi ini juga sebuah studi kasus karena studi ini di desain menjadi penelitian deskriptif dan eksplanatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif.

Sementara itu, dalam rangka mengumpulkan data, studi ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi responden dan dokumen. Akhirnya, untuk analisis penelitian, studi ini mencoba menganalisis aturan-aturan dari kerjasama lintas batas seperti Kerjasama Sosek Malindo yang melaksanakan aktivitas-aktivitinya berdasarkan landasan konsep kerjasama lintas batas (ekonomi, politik, sejarah dan social, dan kerjasama dan persaingan) pada pembangunan regional di Kalimantan, Indonesia.

Hasil dan Pembahasan *Economic Imbalance in Indonesia*

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, kesenjangan ekonomi atau ketidakseimbangan merupakan karakteristik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi geografis, sedangkan karakteristik lainnya adalah konsentrasi ekonomi, yang spasial dalam sebuah Negara karena proses industrialisasi secara selektif dalam dimensi geografis (Kuncoro, 2004).

Dalam hal ketidakseimbangan, Djojohadikusumo (1994) melihat dari dimensi perekonomian daerah bahwa persepsi ketidakseimbangan merupakan ketidakseimbangan ekonomi antardaerah. Dalam kondisi ini, masalah yang dihadapi dalam dilema yang disebut dualisme teknologi. Dalam konteks Indonesia mewakili wilayah kepulauan, dilema dominan dualisme teknologi paling penting disebabkan oleh asimetri (ketidakseimbangan) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber daya alam (Djojohadikusumo, 1994).

Menurut Djojohadikusumo (1994), meskipun warga kebanyakan berpusat di Pulau Jawa, namun sumber daya alam lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain. Kecenderungan perluasan industri di Jawa didasarkan pada peran tenaga kerja, dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa yang tidak didasarkan pada modal manusia. Faktanya, untuk ekspansi industri, lokasi harus bersifat padat modal manusia (solid character of human capital) yang memanfaatkan teknologi modern.

Selain adanya dualisme teknologi, pendekatan pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi mengambil bagian untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan ketidakseimbangan. antar sektor, individu dan juga antar daerah terutama ketidakseimbangan antara wilayah Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Juga pembangunan daerah perbatasan yang berlokasi di Indonesia Timur seperti Pulau Kalimantan.

Sebagai tambahan, letaknya yang jauh dari pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan dan marginalitas dalam kaitannya dengan national core telah membawa kerugian geografis ke dalam daerah ini (Guo, 1996, hal

33-34). Pernyataan ini dapat dipahami baik sebagai panjang jarak antara wilayah Timur dan Barat Indonesia dalam pembangunan daerah, dan juga dari pandangan bahwa perhatian yang diberikan ke daerah tersebut kurang dari daerah lain. Itulah sebabnya Provinsi-provinsi di Kalimantan, khususnya kawasan perbatasan dan perbatasan lainnya di Indonesia, jauh kurang berkembang dibandingkan daerah lain di negeri ini.

Seperti disebutkan, di Indonesia, pengembangan wilayah perbatasan masih relatif kurang perhatian, terutama ketika pemerintahan dipusatkan. Kondisi ini menyebabkan fasilitas dan infrastruktur menjadi terbatas, terjadi kesenjangan sosial, ekonomi, dan teknologi dengan negara-negara tetangga, penipisan cadangan sumber daya alam, penyelundupan, dan masalah-masalah keamanan lainnya. Bagaimanapun, wilayah perbatasan memiliki potensi yang besar sebagai pintu gerbang ke pasar internasional global dan memberikan harapan besar dalam perekonomian jika pemerintah serius membawa masalah ini kedalam catatan mereka.

Kalimantan yang merupakan salah satu bagian dari Indonesia adalah pulau terbesar di antara semua pulau di Indonesia dan memiliki sumber daya yang melimpah termasuk kayu, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Ada empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur (Samarinda), Kalimantan Barat (Pontianak), Kalimantan Tengah (Palangkaraya) dan Kalimantan Selatan (Banjarmasin), yang berbatasan dengan Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah. Ini merupakan daerah strategis dan potensial untuk dikembangkan.

Seperti diuraikan di atas, ada beberapa isu yang berkaitan dengan buruknya koordinasi dari pembangunan area khusus di berbagai provinsi di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah kawasan di Kalimantan yang memiliki nilai strategis sebagai daerah perbatasan antara dua negara. Namun baru-baru ini, rencana pemerintah Indonesia, memberikan penekanan untuk mengurangi ketidakseimbangan atau kesenjangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antar provinsi-provinsi dan wilayah-wilayah di Indonesia. Selain itu, sehubungan

dengan ketetapan hukum bagi pembangunan daerah perbatasan, mengacu pada Rencana Tata Ruang No 24 Tahun 1992 Undang-Undang, wilayah perbatasan merupakan salah satu wilayah yang rencana tata ruangnya diprioritaskan.

Rasionalisasi untuk memprioritaskan kawasan ini didasarkan pada nilai-nilai strategis daerah ini, dengan mempertimbangkan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, keamanan dan pertahanan, dan prioritas pembangunan daerah dalam skala nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Ketetapan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan wilayah perbatasan adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Pembangunan wilayah perbatasan secara khusus dan eksplisit disebutkan diarahkan untuk pembangunan daerah perbatasan dan mengubah arah kebijakan pembangunan dari orientasi "inward-looking" menjadi "out-ward looking", sehingga daerah tersebut dapat memberikan manfaat sebagai pintu kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. Selain menggunakan pendekatan keamanan, pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan juga memerlukan sarana pendekatan kemakmuran (Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009).

Ketetapan-ketetapan di atas adalah contoh-contoh dari bagaimana ketentuan atau ketetapan hukum di Indonesia dari level tertinggi yang telah dimandatkan pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan wilayah perbatasan. Konstitusi secara implisit mewajibkan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dalam batas-batasnya. Ini adalah tugas pemerintah nasional untuk mengamankan batas nasional dan menjamin pemeliharaan hukum dan ketertiban di wilayah perbatasan. Ini meliputi wilayah perbatasan di darat, laut, dan udara dengan negara tetangga. Dengan demikian, daerah perbatasan bisa menjadi yurisdiksi lintas wilayah antar provinsi, kabupaten, kota atau wilayah administratif. Selain itu, daerah perbatasan merupakan daerah strategis. Ini secara nasional berkaitan dengan kehidupan

banyak orang, ditinjau dari kepentingan politik, masyarakat, budaya, lingkungan dan keamanan.

Sejak berbagi perbatasan secara langsung dan geografis dengan negara tetangga atau negara lain, tekad untuk membuat tata ruang wilayah perbatasan di kawasan Kalimantan sebagai kawasan strategis menjadi prioritas pemerintah pusat untuk melaksanakan koordinasi. Struktur ruang wilayah perbatasan di kawasan Kalimantan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang provinsi dan kabupaten yang bersangkutan.

Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan memburuknya kinerja ekonomi di seluruh sektor produksi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sampai akhir tahun 2001, selain berdampak terhadap perekonomian nasional juga berdampak pada memburuknya kinerja ekonomi di daerah-daerah Indonesia, seperti daerah-daerah di kawasan Kalimantan. Krisis ekonomi ini disebabkan memburuknya kinerja ekonomi pada banyak aspek, seperti masalah pendapatan, kemiskinan distribusi dan kesempatan kerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, baru-baru ini rencana pemerintah Indonesia menekankan untuk mengurangi tingginya ketidakseimbangan atau kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antar wilayah dan daerah di Indonesia dan wilayah perbatasan. Sebagai contoh, salah satu kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi, seperti mengatasi memburuknya distribusi pendapatan, kemiskinan dan kesempatan kerja, melalui pengembangan daerah perbatasan di provinsi ini. Kebijakan dasar pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat Daerah, Peraturan No.1 1995 yang menetapkan wilayah perbatasan sebagai kawasan tertentu / prioritas pembangunan strategis, dan pelaksanaan Peraturan yang ditetapkan dalam tahun 2000-2005 yang dikhususkan untuk pembangunan daerah perbatasan di Provinsi ini. Salah satu rencana strategis pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pembangunan daerah yang mengutamakan

pembangunan wilayah perbatasan di provinsi ini adalah pembangunan daerah dalam konteks globalisasi, mengarah pada pembangunan berdasarkan globalisasi, dengan memanfaatkan kerjasama dengan Negara-negara tetangga.

Didasarkan pada keberhasilan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Segitiga Pertumbuhan kerjasama ekonomi, the Growth Triangle economic cooperation of Singapore, Johor dan Indonesia (SIJORI), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGE), pemerintah Indonesia telah mempromosikan kerjasama lintas perbatasan lainnya yang dinamakan Sosial-ekonomi (Sosek Malindo) kerjasama Malaysia-Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan antar daerah di dua wilayah Negara ini.

Kerjasama Sosek Malindo adalah hubungan internasional yang berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan yang ada dan kerjasama antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Kerjasama Sosek Malindo diketahui untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada warga masing-masing kedua negara yang hidup di dalam wilayah perbatasan Indonesia dari Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Kepulauan Riau) dan di dalam wilayah perbatasan negara bagian Malaysia Sabah dan Sarawak dan sepanjang pantai negara bagian Melaka, Johor, Selangor dan Negeri Sembilan. Tujuan Sosek Malindo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tingkat penghidupan di masyarakat wilayah perbatasan kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia.

Guo (1996) menyebutkan bahwa setelah hambatan-hambatan yang berhubungan dengan wilayah perbatasan dihilangkan, wilayah perbatasan secara substansial dapat memperoleh manfaat dari perdagangan lintas batas dan kerjasama dalam hal barang, modal, teknologi, informasi, dan lain-lain. Secara fakta, bahkan aktivitas lintas batas antara China dan Hongking berkembang dengan baik. Daratan utama, the main land China adalah mitra dagang terbesar Hong Kong. Dalam paruh pertama tahun 2003, total perdagangan

dengan main land sebesar HK \$ 702 billion (Fan, 2004). Oleh karena itu, saran untuk mengembangkan wilayah perbatasan dalam rangka meningkatkan pembangunan di kawasan ini memiliki kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan pandangan di atas, sebagaimana tujuan kerjasama Sosek Malindo sesuai dengan rencana tata ruang dan sasaran pembangunan pemerintah Indonesia yang memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan di daerah Indonesia, dan seperti yang disebutkan, pemerintah Indonesia telah mempromosikan kerja sama lintas perbatasan lainnya yang dinamakan sebagai sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah di wilayah perbatasan Indonesia. Selain itu, juga salah satu strategi rencana pemerintah Kalimantan Barat dan Timur untuk pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi yang memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan di provinsi-provinsi ini adalah pembangunan daerah dalam konteks globalisasi, melalui pengembangan dengan melibatkan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, memanfaatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah di provinsi ini, dan kerja sama di provinsi ini telah terbentuk bernama kerjasama sosio-ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Berdasarkan kondisi ini, kita dapat menganalisis dan melihat dampak kegiatan kerjasama lintas batas ini pada pembangunan daerah di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia, melalui pandangan multi dimensi ekonomi, sosial, sejarah dan budaya. dan kerjasama dan persaingan (bukan hanya dari sisi pertahanan keamanan saja).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul dari daerah lintas batas dan ketidakseimbangan ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari dampak lintas batas, CBC saat ini dianggap sebagai agen yang akan mampu menangani dan mengelola masalah daerah perbatasan dan menciptakan manfaat bagi seluruh negara. Meskipun demikian, di Asia umumnya dan Indonesia khususnya,

sedikit yang mengerti tentang peran CBC dan dampaknya terhadap negara khususnya dalam menyelesaikan masalah wilayah perbatasan. Sebagian besar CBCs telah dibentuk beberapa dekade. namun kontribusi mereka terhadap pengembangan wilayah perbatasan negara masih kurang jelas. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk lebih memahami dan menerapkan peran kerjasama lintas batas, CBC seperti kerjasama Sosek Malindo pada pembangunan daerah di kawasan perbatasan Indonesia, seperti di wilayah Kalimantan, yang didasarkan pada pemikiran dasar dari CBC (the rationale foundations of CBC), yaitu pada dimensi ekonomi, politik, budaya dan sejarah, dan kerjasama dan kompetisi. Selain itu, perlu diidentifikasi aspek-aspek atau dasar-dasar pemikiran diluar dari konsep CBC yang ada, yang dilakukan dalam kegiatan kerjasama Sosek Malindo di wilayah Kalimantan, Indonesia yang mungkin berbeda dari konsep-konsep CBC yang ada.

Cross Border Cooperation (CBC)

Literatur terbaru tentang kebijakan regional dan pembangunan menunjukkan bahwa kota-kota dan wilayah-wilayah dalam suatu Negara, semakin dipengaruhi langsung oleh arus material dan non material dalam skala global. Wilayah sub-nasional yang berdekatan dengan batas-batas nasional, yang dikenal sebagai daerah perbatasan, tidaklah luar biasa. Kondisi pembangunan daerah perbatasan, yang cenderung terletak di pinggiran sebuah negara dan tergantung pada basis ekonomi dan politik yang relatif lemah, telah berkembang di bawah pengaruh perubahan dinamis yang sedang berlangsung di arus global seiring dengan restrukturisasi ekonomi global (Enokido, 2007).

Baru-baru ini, sejumlah daerah perbatasan telah mulai mengambil keuntungan dari lokasi mereka yang unik, dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan dan untuk meningkatkan daya saing wilayah mereka dengan membangun hubungan kerjasama dengan negara tetangga melintasi batas-batas antar negara. Pendekatan inovatif untuk perencanaan pembangunan regional, sedang dirintis di bagian dunia ini.

Pendekatan yang menggambarkan upaya pembangunan regional baru yang disebut kerjasama lintas batas, cross border cooperation (CBC), yang mengadopsi outward looking, solusi transnasional untuk masalah-masalah domestik seperti depressed regions, ketidakadilan pertumbuhan distribusi, dan masalah hubungan antara wilayah perkotaan dengan daerah pinggiran (Enokido, 2007). CBC mengacu pada kolaborasi yang dilembagakan antara otoritas melintasi perbatasan nasional. The convention of the council of Europe (CoE) mendefinisikan CBC sebagai setiap tindakan atau upaya yang dirancang untuk memperkuat dan membina hubungan lingkungan antara masyarakat dan otoritas lintas batas. Pihak berwenang yang terlibat memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan mengatur daerah tanpa instruksi dari pemerintah pusat.

Para peneliti mulai membicarakan CBC pada tahun 1980 dan studi mereka mulai berkembang di Eropa, Amerika Utara dan Asia pada 1990-an (Enokido, 2007). Di Asia, studi tentang CBC dibawa ke depan ketika Cina, melalui hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga di mana ia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi (Sobrepena, 1994). CBC dibawah konsepnya, dikristalisasi ketika Singapura berinisiatif melakukan kerjasama dengan Johor, negara bagian selatan Malaysia, dan pulau-pulau Riau di Indonesia untuk membentuk Singapura-Johor-Riau (SIJORI) Growth Triangle (Sobrepena, 1994). Sejak itu, negara-negara Asia semakin berusaha mereplikasi kerjasama lintas-batas wilayah, juga dikenal sebagai daerah pertumbuhan atau pendekatan pertumbuhan segitiga.

Tujuan utama CBC adalah pembangunan ekonomi, tetapi pertimbangan lain seperti; pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan lingkungan hidup juga telah mulai ditangani (Enokido, 2007). Tren ini menunjukkan kapasitas potensial dari CBC untuk bergerak dari tingkat membangun kemitraan perdagangan, untuk memfasilitasi terciptanya skala geografis baru untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi, manusia, dan lingkungan.

Kerjasama Lintas Batas (CBC) merupakan strategi baru untuk pembangunan daerah dalam konteks globalisasi (Enokido, 2007) dan proliferasi CBC diidentifikasi oleh peneliti sebagai sebuah manifestasi dari tipe baru regionalisme. Aykac (1994) mengidentifikasi munculnya cross border regions sebagai regionalisme lintas-perbatasan dan Scott (1998) merujuk sebagai regionalisme lintas batas.

Menurut Keating (1997b), regionalisme klasik sebagian besar berada di dalam negara suatu bangsa dan regionalisme baru melampaui negara suatu bangsa, sebagai dinamika daerah tua memberikan cara untuk mengatur hubungan antar daerah, negara. rejim internasional dan pasar global, meskipun berikutnya tidak hanya mengacu pada regionalisme lintas batas. Keating (1997a) lebih lanjut menunjukkan bahwa sifat dari CBC adalah territorialisasi kembali kegiatan ekonomi, politik, dan pemerintah. Keutamaan teritorial ini diusulkan oleh Friedmann dan Weaver (1979). Memang, para sarjana lainnya (misalnya, Cappellin 1993, Hansen 1981, Kratke 1999, Nijkamp 1993 dan Wong-Gonzales 1998) menunjukkan bahwa kedua wilayah dan integrasi fungsional adalah penting untuk CBC. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah dalam interaksi orang, arus barang dan modal, dan pertukaran pengetahuan, informasi dan budaya antara daerah perbatasan dalam proses CBC dapat menyebabkan organisasi skala baru pembangunan. Oleh karena itu, CBC harus dipahami sebagai bentuk baru dari pembangunan wilayah.

Cross Border Cooperation in Asia

Saat ini, CBC regional telah menyebar di seluruh Asia. Kerjasama ekonomi antara Hong Kong, Taipei dan Cina Selatan telah ditingkatkan dalam apa yang dikenal sebagai Segitiga Pertumbuhan Cina Selatan, the Southern China Growth Triangle. Kerjasama ekonomi di Republik Demokratik Rakyat Korea, Jilin di Cina dan Siberia di Rusia dikenal sebagai daerah pertumbuhan Delta Tumen. Terdapat juga the yellow sea economic zone (pantai Bohai di Cina, dan barat dan utara-

timur Kyushu dan Yamaguichi di Jepang), dan North ASEAN Growth Triangle (Malaysia utara, Sumatra bagian utara di Indonesia, dan Thailand selatan) (Sobrepena, 1994).

Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, dalam arus utama perkembangan wilayah pertumbuhan, Indonesia saat ini aktif terlibat dalam promosi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), kerjasama Segitiga Pertumbuhan ekonomi dari Singapura, Johor dan Indonesia (Sijori), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGE), dan kerjasama Sosio-ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Sebagai wujud dari tipe baru regionalisme, CBC telah tumbuh dan berkembang di Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1980-an, dan Asia pada 1990-an (Enokido, 2007). Dalam pengembangan CBC itu sendiri, praktik-praktik modern dari landasan-landasan rasional, seperti alasan ekonomi, politik, budaya dan sejarah, dan kerjasama dan kompetisi telah diterapkan lebih di Eropa dan negara-negara Amerika Utara lainnya, daripada yang diterapkan di Asia (Enokido, 2007).

Di negara-negara berkembang seperti Eropa dan Amerika Utara, CBC melibatkan lembaga-lembaga supranasional seperti Uni Eropa dan NAFTA, di mana penataan ulang adalah pada tingkat nasional dan internasional. Namun, di Asia, pengembangan CBC sangat pasif dan tidak agresif seperti perkembangannya di Eropa. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa CBC telah ditetapkan beberapa dekade yang lalu, kemajuan CBC kurang jelas dan kontribusinya terhadap perekonomian tidak signifikan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi produksi dan pasar memiliki kekuatan untuk negara-negara di wilayah ini khususnya negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat kolaborasi regional mereka untuk mempertahankan daya saing mereka. Negara-negara Asia sekarang mulai merasakan tekanan untuk bekerja sama dengan tetangga. AFTA adalah salah satu manifestasi dari negara-negara Asia Tenggara untuk terlibat secara aktif dengan negara-negara tetangga lainnya di kawasan ini. Tidak adanya lembaga-lembaga supranasional seperti

Uni Eropa telah memaksa pemerintah nasional untuk secara langsung terlibat dalam upaya CBC.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang saat ini mencoba untuk memanfaatkan hubungan dengan negara tetangga melalui kerjasama lintas batas, CBC untuk mendorong pembangunan wilayah, terutama di wilayah perbatasan. Berbagai upaya telah dilakukan secara regional dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan lain-lain. Keterlibatan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kerjasama diperlukan bagi keberhasilan kerjasama ini. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat Indonesia untuk suksesnya kerjasama ini sangat diperlukan, yang nantinya CBC memberikan kontribusinya terhadap pembangunan regional Indonesia.

CBC in Kalimantan

Seperti disebutkan sebelumnya, wilayah perbatasan Kalimantan memiliki peran strategis as a security belt, gateway dan dan refleksi dari national image, namun peran sebagai sabuk keamanan telah membawa kerugian bagi pengembangan daerah karena praktek penekanan pada pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah nasional. Pendekatan militer yang digunakan oleh pemerintah Indonesia menyebabkan pembatasan terhadap kegiatan sosial-ekonomi sehingga hanya ada pos penjagaan personil militer di daerah tersebut. Negara tetangga, bagaimanapun, telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam menangani wilayah perbatasan. Negara tetangga telah menerapkan sabuk kemakmuran yang menekankan pada pembangunan sosial-ekonomi.

Seperti dijelaskan, ada beberapa masalah yang dihadapi di wilayah perbatasan Kalimantan di berbagai bidang. Salah satunya masalah yang terkait dengan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan, di mana secara umum kesejahteraan hidup masyarakat tetangga yang tinggal di wilayah perbatasan lebih baik daripada masyarakat Kalimantan. Kondisi ini didasarkan pada

kenyataan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat atau komunitas antara Kalimantan Barat dan daerah perbatasan Sarawak berbeda, US \$ 700: US \$ 4.000 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2007).

Selain itu, kondisi pendidikan masyarakat perbatasan di Kalimantan masih relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat Negara tetangga. Selain keterbatasan fasilitas pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Orang lebih suka bekerja di tanah pertanian mereka bukan belajar di sekolah.

Di sektor kesehatan, sikap hidup sehat di kalangan masyarakat di wilayah perbatasan masih rendah. Hal ini mungkin terkait dengan tingkat pendidikan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan juga berkontribusi terhadap kondisi ini. Namun demikian, kondisi saat ini jauh lebih baik daripada di tahun 1980-an ketika kebanyakan orang pergi ke Sarawak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini, jumlah orang yang mengunjungi Sarawak untuk mengakses layanan kesehatan telah menurun karena perbaikan dalam pelayanan kesehatan, melalui pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kecamatan (Aswandi, 2006).

Yang lain, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan kriminal yang sering terjadi di daerah perbatasan adalah penebangan liar, smugglings, pekerja ilegal, perdagangan manusia, dan lain-lain. Sulit bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menangani dan mengantisipasi masalah ini karena keterbatasan kapasitas mereka untuk melakukannya di daerah yang sangat luas.

Penyediaan fasilitas infrastruktur seperti transportasi dan fasilitas komunikasi di wilayah perbatasan di wilayah Kalimantan sangat kurang. Dalam hal ini, tertinggal sangat jauh di belakang Negara tetangga. Manajemen yang menekankan pada aspek keamanan, bukan kemakmuran dapat menjadi penyebab kurangnya penyediaan infrastruktur di daerah perbatasan (Aswandi, 2006). Penyediaan infrastruktur tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi juga memudahkan kelangsungan kegiatan

keamanan. Oleh karena itu, di daerah perbatasan ini, sistem peringatan dini didirikan di sana. Sebagian besar lokasi di daerah perbatasan Kalimantan dapat dicapai dengan transportasi darat. Namun, jalan raya tidak memadai untuk melakukannya. Sebagian besar jalan raya dalam kondisi sangat buruk. Secara umum, pos dan layanan telepon serta televisi dan siaran radio dapat menjangkau daerah perbatasan. Namun, dalam kasus telepon selular sebagian besar masih menggunakan layanan dari operator Malaysia (Aswandi, 2006).

Seperti disebutkan, Kalimantan, wilayah Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia Timur, memiliki "karakter yang unik" dan memiliki posisi strategis karena sebagai daerah yang berdekatan langsung, adjacent in land dengan negara tetangga, Malaysia. Lebih dari itu, kedekatan dan hubungan sosial dan budaya masyarakat di kawasan ini intensif membuat daerah ini perlu mendapat perhatian, dukungan dan prioritas besar untuk pembangunan wilayah ini.

Selain itu kegiatan pembangunan di Kalimantan yang diprioritaskan untuk pembangunan daerah perbatasan dengan memanfaatkan CBC, kerjasama Sosek Malindo, telah berdampak positif pada peningkatan kinerja ekonomi, politik, social dan historical dan pembangunan di provinsi ini. Ini terbukti dari hasil temuan penelitian yang telah saya lakukan di kawasan ini, yang menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang nyata, sangat positif, dari hasil kerjasama antar kawasan Kalimantan dan Negara tetangga, Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah) yang membawa pada pemikiran akan pentingnya kerjasama itu sendiri.

Beberapa dampak positif yang di hasilkan dari kerjasama Sosek Malindo antara lain: dari aspek ekonomi adalah terjadinya perbaikan kondisi ekonomi di kawasan (peningkatan dalam Gross Domestic Product, penurunan tingkat angka kemiskinan dan angka pengangguran, dari aspek politik, yaitu keamanan, masalah lingkungan dan kedaulatan Negara, telah membawa pada iklim yang kondusif, kemudian dari aspek sosial budaya

dan sejarah yaitu terjalinnya hubungan yang menguntungkan dari dimensi-dimensi aspek ini yaitu kerjasama perdagangan tradisional dan alih teknologi, kesamaan bahasa dan hubungan budaya dan sejarah sosial kedua wilayah Kalimantan dan Sabah-Sarawak yang saling mendukung untuk mempererat kerjasama. Akhirnya, aspek kerjasama dan persaingan juga memberikan dampak yang positif dari kerjasama Sosek Malindo bagi pembangunan kedua kawasan ini, yaitu terjalinnya kerjasama antara sektor publik dan swasta, dukungan pemerintah terhadap kompetensi ekonomi, dan berbagi dan memenuhi kebutuhan komunitas yang hidup di dua kawasan perbatasan dari aktivitas-aktivitas kerjasama ini.

Simpulan

Kerjasama Sosek Malindo telah memberikan dampak positif bagi pembangunan regional di Kalimantan, melalui aktivitas-aktivitas kerjasama ini dari aspek-aspek economic, politic, cultural dan historical, dan cooperation and competition dimensions.

Untuk meningkatkan nilai implementasi secara keilmuan dan praktikal, maka beberapa rekomendasi di sajikan di bawah ini:

- A. Peningkatan investasi pemerintah di bidang infrastruktur
 - a. Investasi Pemerintah dan kontinuitas pemerintah di bidang infrastruktur sangat perlu untuk memenuhi jumlah, kualitas, dan stabilitas listrik, penyediaan air bersih, perumahan, pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan di daerah perbatasan. khususnya untuk wilayah non-sponsored karena daya scrap dan sumber daya lembaga pemerintah

daerah dan provinsi yang tidak memadai

- B. Meningkatkan praktek-praktek dalam pemerintahan
 - a. Pemerintah pusat harus mengakui bahwa kerjasama lintas batas, praktik, dan ketertarikan yang berbeda dari praktek-praktek kerjasama internasional seperti dari IMT-GT dan BIMP-EAGE bahkan kerjasama Sosek Malindo ini. Oleh karena itu, operasi birokrasi dan praktek harus memiliki kerangka kerja dan pandangan yang berbeda. Saling menguntungkan dan dukungan teknis untuk negara-negara tetangga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Kegiatan harus mencakup pelatihan jangka pendek, study tour, dan beasiswa untuk belajar di akademi teknis dan instansi pemerintah dan swasta di daerah perbatasan. Kegiatan ini juga akan mempromosikan pemahaman antara atau di antara sistem negara dan mengurangi perbedaan dalam aturan dan peraturan.

Selain itu, perlu solusi dalam masalah kelembagaan. Banyaknya aktor pemerintah yang terlibat dalam kerjasama Sosek Malindo, IMT-GT dan BIMP-EAGA (pemerintah nasional dan provinsi / negara bagian) dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tidak adanya mekanisme kelembagaan yang ada menghubungkan daerah dalam kerjasama Sosek Malindo dan lain-lain antara dan di antara pemerintah dan sektor swasta yang dapat menyebabkan pembentukan struktur baru, sehingga hanya menambah lapisan dalam birokrasi pemerintahan negara-negara peserta.

Referensi

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 2007.
- Aswandi, Z. (2006). *The Governance of Special Region. Institutional. Capacity in the Planning Process for the Development of Trans-national Border Region between*

Indonesia-Malaysia in West Kalimantan Province. Institut Teknologi Bandung and University of Groningen.

- Aykac, A. (1994). *Transborder Regional isation: An Analysis of Transborder Cooperation Structures in Western Europe*

- within the Context of European Integration and Decentralization towards regional and local Governments.* Sindelfingen: LIBERTAS.
- Cappellin, R. and Batey, P. W. J. (Eds.). (1993). *Regional networks, Border Regions and European Integration.* London: Pion.
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan.* PT. Pustaka LPES Indonesia, Jakarta.
- Enokido, K. (2007). *Searching for Partners Across Borders: A Literature Review on Cross Border Cooperation.* Journal Tourism Sciences, Vol.1, 55-79. March.
- Friedmann, J. and Weaver, C. (1979). *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning.* Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Guo, R. (1996). *Border Regional Economics.* Physica-Verlag, Heidelberg, Germany.
- Hanson, G. H. and Spilimbergo, A. (1999). *Political Economy, Sectoral Shocks, and Border Enforcement.* National Bureau of Economic Research. Working Paper, No. 7315.
- Hsing, Y. (1998). *Making Capitalism in China: The Taiwan Connection.* New York and Oxford: Oxford University Press.
- Keating, M. (1997a). "The invention of regions: political restructuring and territorial government in Western Europe." *Environment and Planning C: Government and Policy* 15:383-398.
- _____. (1997b). "The Political Economy of Regionalism." in *The Political Economy of Regionalism*, edited by Keating, M. and Loughlin, J. London and Portland (OR): Frank Cass in association with the Robert Schuman Centre, European University Institute, Florence.
- _____. (1998). *The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change.* Cheltenham (UK) and Northampton (MA): Edward Elgar.
- Kratke, S. (1999). *A Regulationist Approach to Regional Studies.* Environment and Planning A. Oxford University Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang.* Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kurniadi, S.F. (2003). *Penentuan Pusat-pusat Pelayanan untuk Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak (The determination of services centres for the development of West Kalimantan-Serawak Border Area):* Bachelor Thesis. Department of Planology, ITB, Bandung.
- National Development Planning Agency of Indonesia (2006). *Development of Border Area.* Republic of Indonesia.
- Nijkamp, P. (1993). "Border regions and infrastructure networks in the European integration process." *Environment and Planning C: Government and Policy* 11:431-446.
- Robson, C. (1995). *Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers,* Blackwell Publishers.
- Scott, J. W. (1998). "Planning cooperation and transboundary regionalism: implementing policies for European border regions in the German-Polish context." *Environment and Planning C: Government and Policy* 16:605-624.
- Sobrepena, A. M. (1994). *Regional Cross Border Cooperation: A New Dimension in Regional Planning.* Vol. XII, No.3.
- Wong-Gonzales, P. (1998). "Globalization and International Integration: New Strategies of Transborder Regional Development." *Regional Development Dialogue* 19:223-235.